

BAPPEDA DAN LITBANG KABUPATEN MALINAU



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN
2018**



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

KATA PENGANTAR

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagai lembaga teknis daerah Pemerintah Kabupaten Malinau, dalam keberhasilan pencapaian tujuan dan sasarannya sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dari seluruh pelaku pembangunan (*stakeholder*) sehingga Bappeda dan Litbang dituntut untuk mampu memecahkan berbagai permasalahan dan tantangan di Kabupaten Malinau, dalam melayani/memenuhi kebutuhan masyarakat serta memajukan daerah melalui peningkatan kinerjanya.

Sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden N0. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan adanya Permendagri No. 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) dan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD), penyusunan laporan kinerja merupakan kewajiban bagi seluruh instansi pemerintah dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Laporan kinerja Bappeda dan Litbang menjadi sebuah penetapan/perjanjian sekaligus menjadi dasar untuk pengukurannya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau Tahun 2016-2018 dan Rencana Kerja Bappeda dan Litbang Tahun 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 ini tidak terlepas dari kekurangan dan kendala-kendala, namun



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

untuk mengatasi kendala tersebut Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tetap berupaya melalui koordinasi bersama para pelaksana kegiatan. Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini dapat menjadi koreksi dan menciptakan kinerja yang lebih baik lagi.

Malinau, 17 Januari 2019
Kepala Bappeda dan Litbang

Drs. Kristian, M.Si
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19661123 199503 1 001



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR ISI

Kata pengantar	i
Daftar Isi	iii
Ikhtisar Eksekutif	v
Lampiran	vi
Bab I Pendahuluan	1.1
A. Maksud dan Tujuan Laporan	1.1
B. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi	1.1
C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang	1.6
D. Isu Strategis	1.8
Bab II Perencanaan Kinerja	2.10
2.1 Rencana Strategis Tahun 2016-2021	2.10
2.1.1 Visi	2.11
2.1.2 Misi	2.11
2.1.3 Tujuan	2.11
2.1.4 Sasaran	2.12
2.1.5 Strategi dan kebijakan	2.12
2.1.6 Program dan Kegiatan	2.14
2.1.8 Perjanjian Kinerja	2.17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	3.19
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	3.1
3.A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2018	3.19
3.A.2 Analisis Penyebab Keberhasilan	3.20
3.A.3 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	3.20
3.A.4 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	3.20
Bab IV Penutup	4.1



***LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018***



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

LAMPIRAN

Tabel 1.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2016-2021

Tabel 1.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang ini memberikan gambaran tentang kinerja Bappeda dan Litbang pada tahun 2018. LKjIP merupakan alat ukur akuntabilitas kinerja, tetapi juga sebagai saran yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan kinerja diwaktu yang akan datang. Dengan langkah ini Bappeda dan Litbang senantiasa dapat melakukan perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. LKjIP memberikan informasi keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan program kegiatan serta hambatan-hambatan / kendala yang dijumpai dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu LKjIP ini juga menjelaskan upaya-upaya dalam rangka perbaikan kinerja agar sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai sesuai yang direncanakan. Sesuai APBD Tahun anggaran 2018 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau mengelola anggaran sebesar Rp 16.441.109.881.53,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 9.557.371.412,- dan Belanja Langsung sebesar Rp 6.883.738.469,- Belanja Tidak Langsung digunakan untuk belanja pegawai, yaitu belanja gaji dan tunjangan. Sedangkan Belanja Langsung digunakan membiayai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau. Realisasi keuangan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung sebesar 91.95 % dengan penyerapan dana sebesar Rp 15.117.575.690,- Dari sisi akuntabilitas kinerja Program dan Kegiatan, Bappeda melaksanakan 9 program dan 33 kegiatan. Perkembangan pelaksanaan program dan kegiatan sampai akhir bulan Desember tahun 2018 adalah realisasi



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

fisik sebesar 99.34 %. Dari hasil pengukuran kinerja, secara umum kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dapat dikategorikan sangat baik. Hal ini dibuktikan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja berada di interval 95-100 atau sangat berhasil.



Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

TABEL III.3
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018
1	2	3	4	5	6
1 Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1 Tersusunnya dokumen untuk penyusunan RKPD kab. Malinau TA 2019	Jumlah dokumen Musrenbang yang tersusun	Dokumen	1	1
	2 Tersusunnya dokumen sebagai dasar penyusunan RAPBD-P 2018 dan RAPBD kab. Malinau TA 2019	Jumlah dokumen Dokumen KUA, PPAS 2019 dan KUPA, PPAS Perubahan 2018 yang tersusun	Dokumen	4	4
	3 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKPD Perubahan TA. 2018 dan RKPD 2019	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD	Dokumen	2	2
	4 Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) yang tersusun	Dokumen	*keg. di th 2018	1
	5 Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	Aplikasi	*keg. di th 2018	2

	6	Tersedianya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021	Jumlah dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021 yang tersusun	Dokumen	1	1
2		Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	1 Tersedianya Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPR	Jumlah Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPR	Buku	*keg. di th 2018 5
	2	Tersedianya buku profile daerah	Jumlah buku profile daerah yang tersusun	Buku	1	1
	3	Tersedianya buku LKPJ Bupati Malinau TA 2017	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau TA 2017	Jenis Buku	2	2
	4	Tersusunnya laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Dokumen	1	1
3	1	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	1 Terkoordinirnya perencanaan pembangunan di kalimantan utara	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Bappeda & Litbang se-kalimantan utara	Kali/Tahun	1 1
	2	Tersedianya laporan rekomendasi hasil koordinasi dn konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	%	100	100

BAB I PENDAHULUAN

A. MAKSUD DAN TUJUAN LAPORAN

A.1 Maksud Laporan

1. Memberikan informasi perkembangan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Memberikan informasi perkembangan realisasi fisik dan keuangan yang dikelola Bappeda dan Litbang
3. Memberikan informasi kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas tiap bulan
4. Menemukan alternative pemecahan permasalahan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran

A.2 Tujuan Laporan

1. Sebagai sarana laporan pelaksanaan tugas Bappeda dan Litbang
2. Salah satu bahan informasi dalam proses pengambilan kebijakan penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang
3. Sebagai bahan peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan kegiatan Bappeda dan Litbang

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Guna memantapkan pelaksanaan kewenangan dibidang perencanaan pembangunan, maka berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau berlandaskan pada beberapa pedoman sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
4. Permendagri No 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Malinau Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja OPD

B.1 Kedudukan :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

B.2 Tugas :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan Urusan pemerintahan daerah di bidang Data , Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Prasarana dan Pengembangan Wilayah,

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

Ekonomi , Sosial, Budaya dan Pemerintahan, Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

B.3 Fungsi :

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, terdiri dari :

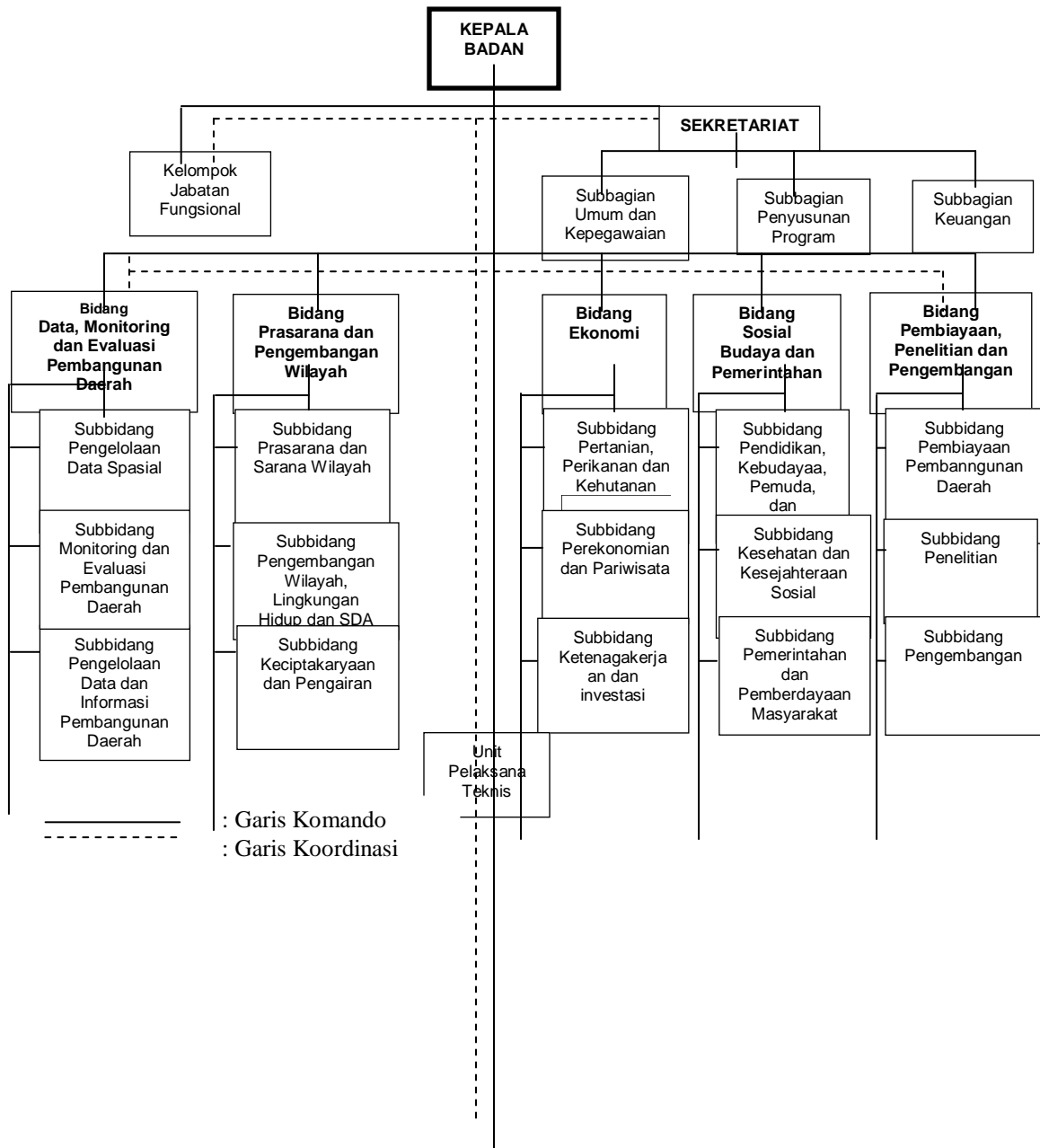
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan unsur pembantu pimpinan yang terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan;
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 3. Subbagian Penyusunan Program.
- c. Bidang Data, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

1. Subbidang Pengelolaan Data Spasial;
 2. Subbidang Pengelolaan Data dan Informasi Pembangunan Daerah;
 3. Subbidang Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
- d. Bidang Prasarana dan Pengembangan Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
1. Subbidang Sarana dan Prasarana Wilayah;
 2. Subbidang Pengembangan Wilayah, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;
 3. Subbidang Keciaptakaryaan dan Pengairan.
- e. Bidang Ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas:
1. Subbidang Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
 2. Subbidang Perekonomian dan Pariwisata;
 3. Subbidang Ketenagakerjaan dan Investasi.
- f. Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
1. Subbidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;
 2. Subbidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial;
 3. Subbidang Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat.
- g. Bidang Pembiayaan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana yang terdiri atas :
1. Subbidang Pembiayaan Pembangunan Daerah;
 2. Subbidang Penelitian;
 3. Subbidang Pengembangan.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA DAN LITBANG
KABUPATEN MALINAU**



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

C. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Bappeda dan Litbang

Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), telah merubah pola perencanaan yang ada dari shopping list ke working plan. Dimana Organisasi Bappeda dan Litbang menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang disusun merupakan hasil dari proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.

Keterpaduan proses perencanaan ini diharapkan akan lebih banyak dapat menampung aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap dalam proses perencanaan. Indikasi dari persoalan tersebut adalah kecilnya realisasi dari usulan yang disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang dapat tertampung dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah selama ini.

Guna mendukung kondisi yang diinginkan, kemampuan teknis perencanaan perlu ditingkatkan, sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk program dan kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi, bukan sekedar kegiatan yang diinginkan seperti kebanyakan usulan selama ini.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi perencana dalam hal ini Bappeda dan Litbang yang membantu Kepala Daerah dalam Perencanaan Pembangunan Daerah, sehingga semakin profesional dalam bidang tugasnya. Untuk itu kualitas aparatur, sikap aparatur sangatlah menentukan dalam mewujudkan good governance.

Pada kondisi saat ini peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

produk perencanaan. Hal ini disebabkan adanya beberapa permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat basis yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan dan berakibat pada tumbuhnya perilaku melanggar (shortcutting);
3. Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
4. Kompetensi SDM perencana belum optimal;
5. Belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan;
6. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi program-program pembangunan yang dikaitkan dengan dokumen-dokumen perencanaan;
7. Belum lengkapnya Standar Operating Procedure (SOP) perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel;
8. Belum meratanya kapasitas analitik SDM perencana.
9. Belum optimalnya fungsi penelitian dalam menghasilkan kajian-kajian strategis.
10. Belum optimalnya pemanfaatan Dokumen Perencanaan yang dihasilkan Bappeda dan Litbang
11. Belum terbangunnya sistim informasi data pembangunan;
12. Belum optimalnya keterlibatan masyarakat dalam proses

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

perencanaan pembangunan;

13. Belum optimalnya penelaahan usulan masyarakat oleh OPD;
14. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan dengan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output dan outcome yang dihasilkan;
15. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan

D. Isu Strategis

Perencanaan pembangunan secara terpadu, terarah dan berkesinambungan, diperlukan analisis terhadap berbagai isu strategis pada lingkup Internasional, Nasional, Regional termasuk Isu daerah. Bappeda dan Litbang sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran yang sangat penting didalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan, oleh karenanya analisis isu strategis tersebut merupakan langkah awal didalam proses perencanaan pembangunan daerah. Analisis isu strategis dilakukan melalui proses *brainstorming* dan *mapping* jenis layanan yang telah dilakukan oleh Bappeda dan Litbang, faktor pendorong dan penghambat pelaksanaan layanan, tantangan dan peluang pengembangan layanan. Berdasarkan proses analisis tersebut, maka isu strategis Bappeda dan Litbang adalah sebagai berikut :

1. Mekanisme perencanaan belum berjalan lancar;
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

5. Belum optimalnya analisa usulan program dan kegiatan OPD sehingga terjadi ketidakselarasan output, outcome yang dihasilkan dan kontribusinya pada pencapaian sasaran daerah;
6. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
7. Belum optimalnya hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan;
8. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021

Rencana Strategis (Renstra) 2016-2021 merupakan acuan dalam perencanaan, pemrograman dan penganggaran berbasis kinerja untuk menyusun dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Malinau. Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, rencana strategis merupakan langkah awal yang sangat menentukan agar mampu menjawab tantangan kinerja serta tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas, terukur dan terpadu, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada serta harus mendukung tercapainya target kinerja yang tertuang didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2016-2021.

Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan serta pendanaan indikatif organisasi selama 5 tahun.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

2.1.1 VISI

Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2016-2021 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau Yang Maju Dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun”** berdasarkan tujuan dan misi RPJMD di atas, peran Bappeda dan Litbang yang strategis terdeskripsi secara jelas sebagaimana tertuang dalam visi dan misi Bappeda dan Litbang. Kualitas birokrasi dan pengelolaan pembangunan dijabarkan dalam cara pandang dalam pengelolaan perencanaan pembangunan yang partisipatif, akomodatif, efektif dan efisien. Dengan visi ini diharapkan kualitas pengelolaan pembangunan di Kabupaten Malinau terutama ditinjau dari aspek perencanaan lebih meningkat dan menjadi lebih baik dari waktu sebelumnya.

2.1.2 MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan yang merupakan penjabaran dari visi yang telah ditetapkan. Adapun langkah yang perlu dilaksanakan untuk mencapai visi Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau dengan menentukan misi berupa :

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan.

2.1.3 TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu analisis strategis.

Berdasarkan misi tersebut diatas, maka tujuan Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan.
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

2.1.4 SASARAN

Sasaran Bappeda dan Litbang periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif.
2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.
3. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat
4. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana.
5. Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan.

2.1.5 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat untuk menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan. Arah kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan, serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah. Selanjutnya dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Pemerintah Daerah dalam 5 (lima) tahun mendatang, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Visi : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Maju dan Sejahtera Melalui Gerakan Desa Membangun			
Misi 2 : Meningkatkan peranserta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan daerah, mulai dari Fase perencanaan, implementasi, pertanggungjawaban, dan evaluasi.			
Misi 9 : Mewujudkan supremasi hukum dan menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, serta efisien Guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.	1. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif. 2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan.	1. Meningkatkan pelaksanaan analisis, pengkajian dan perumusan kebijakan strategis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan yang bersifat lintas dimensi. 2. Melibatkan seluruh komponen pelaku pembangunan dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan.	1. Meningkatkan kualitas kajian sebagai bahan perencanaan pembangunan. 2. Mendorong peningkatan kualitas perencanaan, monitoring dan evaluasi program pembangunan peningkatan peran serta dan keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. 3. Peningkatan sinkronisasi dan sinergisme hasil kajian terhadap perencanaan pembangunan daerah.
Misi 3 : Meningkatkan kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur daerah baik perkotaan, perdesaan, perdatan maupun perbatasan, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dasar, yaitu: jalan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan informasi.			
1. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan	1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat.	1. Penyediaan dan pemutakhiran data dan informasi bahan	1. Membangun dan mengembangkan pusat data dan informasi

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

informasi pembangunan		perencanaan pembangunan yang akurat dan cepat. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi dan pengembangan manajemen pengelolaan data dan informasi.	perencanaan, pengendalian, evaluasi dan tata ruang. 2. Peningkatan kualitas data pembangunan melalui pengembangan dan penyempurnaan sistem informasi serta pemantapan manajemen pengelolaan data.
Misi 1 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia, melalui upaya penyediaan tenaga kerja terampil dan terdidik. Misi 12 : Memantapkan kapasitas Pemerintahan Kabupaten, Kecamatan dan Desa dalam menyelenggarakan kepentingan rakyat.			
1. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana. 2. Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan.	1. Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM perencana. 2. Pengembangan kapasitas mekanisme kerja.	1. Meningkatkan potensi dan kompetensi SDM perencana. 2. Membangun dan mengembangkan sarana prasarana institusi perencanaan.

2.1.6 PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Program yang terkait langsung dengan pencapaian Sasaran Strategis

1. Program Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :

- Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda)
- Penyusunan KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS
- Rapat koordinasi bappeda dan litbang se-provinsi Kalimantan utara
- Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
- Koordinasi kegiatan DAK, bantuan keuangan provinsi dan tepra
- Penyusunan, evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)
- Pengadaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

- Penyusunan RPJMD perubahan
 - Kajian optimalisasi dana transfer daerah dalam percepatan pembangunan kabupaten perbatasan dan konservasi
 - Kajian kebutuhan buku wajib belajar jenjang PAUD, SD, SMP di Kab. Malinau
 - Pembentukan lembaga dan forum CSR Kab. Malinau
2. Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar dengan kegiatan :
- Study kelayakan dan masterplan kota mandiri kabupaten malinau
 - Study kelayakan ibu kota malinau menjadi kota mandiri
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan kegiatan :
- Koordinasi kegiatan tim koordinasi kabupaten dan tim distric project management unit (DPMU) program nasional penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat
 - Koordinasi strategi pembangunan pemukiman dan infrastruktur perkotaan (SPPIP/RP2KP)
4. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dengan kegiatan sebagai berikut :
- Pendampingan kemakmuran hijau
 - Pendampingan kegiatan HOB (Heart Of Boneo)
 - Penunjang kegiatan DP3K TNKM
5. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam dengan kegiatan sebagai berikut :
- Penyusunan rencana pengembangan kawasan sentra produksi pertanian

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

6. Program Pengembangan Data/Informasi dengan kegiatan :
 - Penyusunan profile daerah kabupaten malinau
 - Penyusunan LKPJ Bupati Maalinau tahun 2017
 - Dokumentasi penginderaan jauh ibu kota kecamatan
7. Program Perencanaan Sosial dan Budaya dengan kegiatan :
 - Penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah
 - Pemutahiran data dan informasi rumah tangga miskin
 - Pengendalian rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi pemerintah daerah (RAD-PPK tahun 2018)
8. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan sebagai berikut :
 - Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
 - Penyediaan alat tulis kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan makanan dan minuman
 - Rapat koordinasi, konsultasi dalam dan luar daerah
9. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
 - Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

2.1.7 RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018

**Tabel II.1
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2018 Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau**

NO	SASARAN			PROGRAM	KEGIATAN		
	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET		URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	1	2	3		5	6	7
1	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Dokumen Perencanaan Partisipatif dalam Pembangunan Daerah Tersedianya dokumen penyusunan RAPBD-P 2018 dan RAPBD 2019 Usulan Kabupaten Malinau yang belum terakomodir Usulan Kabupaten Malinau yang belum terakomodir	20 Buku 4 Dokumen 1 Tahun 50%	Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Musyawarah perencanaan pembangunan daerah (Musrenbangda) 2 Penyusunan KUA, PPAS-Perubahan dan KUA, PPAS 3 Rapat Koordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kalimantan Utara 4 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)	Tersusunnya dokumen untuk penyusunan RKPD kab. malinau TA 2019 Tersusunnya dokumen sebagai dasar penyusunan RAPBD-P 2018 dan RAPBD 2019 Terkoordinirnya perencanaan pembangunan di kalimantan utara Terlaksananya kegiatan pembangunan RKPD perubahan TA 2018 dan RKPD 2019	20 Buku 4 Dokumen 1 Tahun 50%

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	5 Buku		5 Koordinasi Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Tepra	Tersedianya buku koordinasi dan monitoring kegiatan DAK, bantuan keuangan provinsi dan TEPR	5 Buku
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen		6 Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Tersusunnya dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	1 Dokumen
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen		7 Pembentukan Lembaga dan Forum CSR Kabupaten Malinau	Tersusunnya dokumen kelembagaan tentang CSR	1 Dokumen
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	2 Aplikasi		8 Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	2 Aplikasi
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	95%		9 Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Sekolah Dasar SD, SMP, SMA di Kabupaten Malinau	Tersedianya kajian kebutuhan buku wajib Sekolah Dasar SD, SMP, SMA di Kabupaten Malinau	95%
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	95%		10 Penyusunan RPJMD Perubahan	Tersedianya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021	95%
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	95%		11 Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Kabupaten Perbatasan dan Konservasi	Tersedianya kajian optimalisasi dana transfer daerah	95%
2	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Pemerintah Daerah Kab. Malinau	2 Dokumen	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1 Study Kelayakan dan Masterplan Kota Mandiri Kabupaten Malinau	Tersusunnya dokumen study kelayakan dan masterplan	2 Dokumen
			2 Dokumen		2 Study Kelayakan Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	Tersusunnya dokumen study Kelayakan Ibu Kota Malinau Menjadi Kota Mandiri	2 Dokumen

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

3	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Koordinasi Kegiatan Tim Koordinasi Kabupaten dan Tim Distric Project Management Unit (DPMU) Program Nasional Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat	Tersusunnya RAD terkait air minum	1 Dokumen
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen		2 Koordinasi Strategi Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur Perkotaan (SPPIP/RP2KP)	Tersusunnya RAD keciptakaryaan	1 Dokumen
4	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen	Perencanaan Pembangunan ekonomi	1 Pendampingan Kemakmuran Hijau	Tersusunnya laporan kegiatan pendampingan kemakmuran hijau	1 Dokumen
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen		2 Pendampingan Kegiatan HOB (Heart Of Borneo)	Tersusunnya laporan kegiatan pendampingan kegiatan HOB (Heart of Borneo)	1 Dokumen
		Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Buku		3 Penunjang Kegiatan DP3K TNKM	Tersusunnya laporan kegiatan DP3K TNKM	1 Buku
5	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	Pemerintah Daerah Kab. Malinau	1 Dokumen	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1 Penyusunan Rencana Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pertanian	Tersedianya dokumen rencana pengembangan kawasan sentra pertanian	1 Dokumen
6	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	Pemerintah Kab. Malinau	1 Dokumen	Program Pengembangan Data/Informasi	1 Penyusunan Profile Daerah Kabupaten Malinau	Tersedianya buku profil daerah	1 Dokumen
		Pemerintah Kab. Malinau	2 Jenis Buku		2 Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahun 2017	Tersedianya buku LKPJ Bupati Malinau TA 2017	2 Jenis Buku

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

		Kecamatan, Pedalaman & Perbatasan	95%		3 Dokumentasi Penginderaan Jauh Ibu Kota Kecamatan	Tersedianya data spasial eksisting yang terbaharui pada ibu kota kecamatan yang belum tercover photo udara	95%
7	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan		1 Dokumen	Program Perencanaan Sosial dan Budaya	1 Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah	Tersusunnya laporan penanggulangan kemiskinan daerah	1 Dokumen
		Rumah tangga miskin dengan tingkat kesejahteraan rendah	95%		2 Pemutahiran Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin	Tersedianya data dan informasi untuk perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan daerah	95%
		OPD pemangku aksi RAD-PPK di lingkungan kab. Malinau	95%		3 Pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah (RAD-PPK Tahun 2018	Tersedianya laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau TA 2018	95%
8	Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Bappeda & Litbang	90%	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	Tersedianya peralatan kantor yang memadai	90%
		Bappeda & Litbang	100%		2 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Terakomodirnya pelayanan administrasi perkantoran	100%
		Bappeda & Litbang	100%		3 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya barang cetak dan penggandaan	100%
		Bappeda & Litbang	100%		4 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya peralatan kerja kantor	100%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

		Bappeda & Litbang	100%		5 Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makan dan minum	100%
		Bappeda & Litbang	100%		6 Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	Tersedianya laporan rekomendasi hasil kordinasi dan konsultasi	100%
9	Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	Bappeda & Litbang	100%	Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya kendaraan dinas operasional yang memadai	100%

*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

2.1.8 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa target yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Bappeda dan Litbang Tahun 2018 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun (tahun 2018) dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya.

Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2018 mengacu pada Renstra Tahun 2016-2021. Secara garis besar perjanjian kinerja tahunan tahun 2018 meliputi sasaran strategis Indikator Kinerja dan target kinerja yang ingin dicapai Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau pada tahun 2018 secara rinci dapat dilihat pada Tabel II.

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Tabel II.2

**Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Bappeda dan Litbang
Kabupaten Malinau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif	1. Tersedianya dokumen perencanaan yang komprehensif dan implementatif 2. Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	Dokumen
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	1. Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat 2. Meningkatnya efektifitas system informasi data yang terpadu	Dokumen
3	Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan	1. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana 2. Meningkatnya fasilitas pendukung perencanaan pembangunan	100%



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang diselenggarakan melalui proses dan tahapan Perencanaan Strategis, Perencanaan Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja.

Didalam bab ini akan dibahas mengenai Akuntabilitas Kinerja Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau yaitu kriteria ukuran keberhasilan kinerja, realisasi sasaran strategis tahun 2018, pengukuran kinerja tahun 2018, analisis keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian kinerja, hambatan serta langkah-langkah antisipatif untuk tercapainya target kinerja organisasi. Bab ini juga memuat target dan realisasi kinerja keuangan tahun 2018.

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Target dan Realisasi Kinerja Sasaran Tahun 2018

Indikator kinerja merupakan dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Karakteristik indikator kinerja Bappeda dan Litbang bersifat positif, yaitu semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian yang semakin baik. Untuk skala pengukuran kinerja dan predikatnya adalah sebagai berikut :

- a. Capaian kinerja >95% sampai dengan 100% = Sangat Berhasil;
- b. Capaian kinerja >80% sampai dengan 95% = Berhasil;
- c. Capaian kinerja >50% sampai dengan 80% = Cukup Berhasil;
- d. Capaian kinerja <50% = Kurang Berhasil.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran. Secara rinci capaian masing-masing indikator sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel III.1
Realisasi Sasaran Strategis Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN		REALISASI	TINGKAT CAPAIAN (%)	PREDIKAT	
			SATUAN	TAHUN 2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1 Tersusunnya dokumen untuk penyusunan RKPD kab. Malinau TA 2019	Jumlah dokumen Musrenbang yang tersusun	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
		2 Tersusunnya dokumen sebagai dasar penyusunan RAPBD-P 2018 dan RAPBD kab. Malinau TA 2019	Jumlah dokumen Dokumen KUA, PPAS 2019 dan KUPA, PPAS Perubahan 2018 yang tersusun	Dokumen	4	4	100.00	sangat berhasil



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

	3	Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKPDP Perubahan TA. 2018 dan RKPDP 2019	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPDP	Dokumen	2	2	100.00	sangat berhasil
	4	Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPDP, RENSTRA, RENJA)	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPDP, RENSTRA, RENJA) yang tersusun	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
	5	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	Aplikasi	2	2	100.00	sangat berhasil
	6	Tersedianya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021	Jumlah dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021 yang tersusun	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil
2 Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat	1	Tersedianya Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPPA	Jumlah Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPPA	Buku	5	5	100.00	sangat berhasil
	2	Tersedianya buku profile daerah	Jumlah buku profile daerah yang tersusun	Buku	1	1	100.00	Sangat berhasil
	3	Tersedianya buku LKPP Bupati Malinau TA 2017	Jumlah buku LKPP Bupati Malinau TA 2017	Jenis Buku	2	2	100.00	sangat berhasil
	4	Tersusunnya laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Dokumen	1	1	100.00	sangat berhasil



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

3	Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencana	1	Terkoordinirnya perencanaan pembangunan di kalimantan utara	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Bappeda & Litbang se-kalimantan utara	Kali/Tahun	1	1	100.00	sangat berhasil
		2	Tersedianya laporan rekomendasi hasil koordinasi dn konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	%	100	100	100.00	sangat berhasil

Dari tabel diatas dapat diberikan penjelasan bahwa secara keseluruhan capaian kinerja tahun 2018 telah memenuhi target yang ada dalam Rencana Strategis, hal ini terjadi karena terdapatnya penambahan anggaran dan kegiatan pada DPA perubahan tahun 2018 serta adanya beberapa penyesuaian kondisi lapangan sehingga menyebabkan capaian kinerja untuk sasaran strategis.



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

**Tabel III.2
Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2018**

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	KINERJA			PROGRAM	ANGGARAN		
				TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10	11=10/9*100
1	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1 Jumlah dokumen musrenbang TA 2018 dan 2019 yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Perencanaan Pembangunan Daerah	600,000,000	548,765,041	91.46
		Dokumen KUA, PPAS 2019 dan KUPA, PPAS-Perubahan TA 2018	Dokumen	4	4	100		291,738,000	291,738,000	100.00
		Terlaksananya koordinasi pembangunan se-kalimantan utara	Kali/Kegiatan	1	1	100		75,000,000	74,970,000	99.96
		Jumlah dokumen perencanaan RKPd	Dokumen	2	2	100		250,000,000	250,000,000	100.00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

		Terlaksananya koordinasi kegiatan DAK, bantuan keuangan provinsi dan TEPR	Buku	5	5	100		150,000,000	146,060,000	97.37
		hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan yang tersusun	Dokumen	1	1	100		150,000,000	133,250,000	88.83
		Jumlah SKPD yang menggunakan aplikasi dan E-Monev	SKPD	56	56	100		800,000,000	633,413,772	79.18
		Jumlah dokumen RPJMD perubahan 2016-2021	Dokumen	1	1	100		310,200,000	309,700,000	99.84
		Data optimasilsasi Dana Transfer Daerah yang Tersedia	Dokumen	1	1	100		1,937,380,000	1,306,132,170	67.42



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

		Jumlah Dokumen Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar PAUD, SD, SMP di Kab. Malinau	Dokumen	1	1	100		150,000,000	140,502,104	93.67
		Jumlah dokumen kelembagaan tentang CSR yang tersusun	Dokumen	1	1	100		200,000,000	198,738,530	99.37
		Dokumen study kelayakan dan masterplan yang tersusun	Dokumen	2	2	100	Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	171,161,511	171,161,511	100.00
		Dokumen study kelayakan dan masterplan yang tersusun	Dokumen	2	2	100		328,838,489	320,688,489	97.52
		Jumlah dokumen RAD terkait air minum yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	30,000,000	29,062,020	96.87
		RAD keciptakarya an yang tersusun	Dokumen	1	1	100		30,000,000	29,760,000	99.20



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

		Laporan kegiatan pendampingan kemakmuran hijau yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Perencanaan Pembangunan Ekonomi	30,000,000	29,963,485	99.88
		Laporan kegiatan pendampingan kegiatan HOB (Heart of Borneo) yang tersusun	Dokumen	1	1	100		50,000,000	49,014,800	98.03
		Jumlah laporan kegiatan DP3K TNKM yang tersusun	Buku	1	1	100		150,000,000	100,070,088	66.71
		Jumlah dokumen rencana pengembangan kawasan sentra pertanian	Dokumen	1	1	100	Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	100,000,000	99,780,000	99.78
2	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan	Buku profil daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Pengembangan data/informasi	100,000,000	100,000,000	100.00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

		Buku LKPJ Bupati Malinau TA 2017 yang tersusun	Jenis/Buku	2	2	100		130,000,000	123,595,200	95.07
		Persentase data spasial eksisting yang terbaharui pada ibu kota kecamatan yang belum tercover photo udara	%	95	95	100		30,000,000	29,910,000	99.70
		Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah yang tersusun	Dokumen	1	1	100	Perencanaan Sosial dan Budaya	50,000,000	49,775,000	99.55
		Jumlah data dan informasi untuk perencanaan dan program penanggulangan kemiskinan daerah	%	95	95	100		195,480,000	194,498,120	99.50
		laporan RAD-PPK Kabupaten Malinau TA 2018 yang tersusun	%	95	95	100		4,520,000	4,520,000	100.00



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018**

3	Meningkatkan Kualitas dan Sumber Daya dan Pelayanan Umum Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase peralatan kantor yang memadai	%	100	100	100	Pelayanan Administrasi Perkantoran	10,000,000	10,000,000	100.00
		Persentase pelayanan administrasi perkantoran yang terakomodir	%	100	100	100		75,000,000	75,000,000	100.00
		Persentase tersedianya barang cetak dan penggandaan	%	100	100	100		30,000,000	30,000,000	100.00
		Persentase peralatan kerja kantor yang tersedia	%	100	100	100		50,000,000	50,000,000	100.00
		Persentase penyediaan makan dan minum	%	100	100	100		9,420,469	9,420,000	100.00
		Persentase tersedianya laporan rekomendasi hasil kordinasi dan konsultasi	%	100	100	100		350,000,000	348,750,591	99.64



***LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018***

		Persentase kendaraan dinas operasional yang memadai	%	100	100	100	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	45,000,000	44,956,700	99.90
--	--	---	---	-----	-----	-----	--	------------	------------	-------



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

A.2 Analisis Penyebab Keberhasilan

Pada umumnya kualitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Malinau mengalami peningkatan. Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan perencanaan tersebut meliputi :

1. Tersedianya sarana / prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.
2. Adanya penyelenggaraan mekanisme perencanaan pembangunan yang bersifat partisipatif.
3. Adanya keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan antara lain: DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi dan sector swasta.
4. Meningkatnya konsistensi antara dokumen perencanaan dengan mekanisme penyusunan anggaran.
5. Meningkatnya efektifitas produk-produk pengembangan dan penelitian berupa hasil kajian, yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan pembangunan.

A.3 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Di bidang sumber daya manusia, jumlah staf Bappeda dan Litbang relatif mencukupi untuk menjalankan misi organisasi. Kualitas Sumber Daya Manusia juga berpengaruh pada keterbukaan pada ide-ide baru dan kesediaan untuk berubah dan beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang berubah. Oleh karena itu, dari sisi kuantitas, Sumber Daya Manusia di Bappeda dan Litbang merupakan kekuatan organisasi, namun demikian dari sisi kualitas Sumber Daya Manusia di Bappeda dan Litbang tetap terus ditingkatkan, sehingga diperlukan program dan kegiatan



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

Peningkatan Sumber Daya Aparatur Bappeda dan Litbang setiap tahunnya.

Prasarana dan sarana merupakan aset berwujud (tangible assets) yang berperan penting dalam menunjang roda operasional organisasi. Dengan beban yang ada saat ini prasarana dan sarana dirasakan masih kurang, khususnya terkait sarana data dan informasi sebagai input utama perencanaan pembangunan. Namun demikian, Bappeda dan Litbang memiliki aset tak berwujud (intangible asset) yang sangat bernilai bagi eksistensi organisasi, yaitu posisi dan reputasi sebagai “leading sector” dalam perencanaan pembangunan daerah. Aset ini menjadi modal yang berharga dalam menjalankan fungsi koordinasi eksternal dan menjembatani konflik kepentingan antarsektor. Fungsi ini pada gilirannya juga melahirkan aset yang lain yakni pengalaman dalam penyusunan berbagai dokumen rencana pembangunan yang terakumulasi dari tahun ke tahun.

Tingkat efektifitas Anggaran Belanja Bappeda dan Litbang sudah memenuhi kriteria efektif karena realisasi anggaran yang sudah memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan pencapaian target program dan kegiatan sudah sangat cukup.

Efisiensi Anggaran Belanja Bappeda dan Litbang sudah sangat bagus. Dalam menghitung tingkat efisiensi, berpatokan pada hal biaya. Dimana, efisiensi hanya akan ditentukan oleh ketepatan didalam mendayagunakan anggaran belanja dengan memberikan prioritas pada faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan. Dalam laporan realisasi anggaran belanja Bappeda dan Litbang , faktor-faktor input yang dapat mengacu pencapaian tujuan dimasukkan dalam anggaran belanja langsung. Dimana ada beberapa kegiatan yang dianggarkan dan masuk dalam anggaran belanja langsung.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja

$$\text{EFISIENSI} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA LANGSUNG}}{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

kriteria tingkat efisiensi anggaran belanja sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien.
3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien

Tingkat efektifitas diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan target anggaran belanja

$$\text{EFEKTIFITAS} = \frac{\text{REALISASI ANGGARAN BELANJA}}{\text{TARGET ANGGARAN BELANJA}} \times 100\%$$

Sumber : Mahsun (2009)

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efektif.
2. Jika hasil pencapaian antara 90% - 100%, maka anggaran belanja dikatakan efektif.



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

3. Jika hasil pencapaian antara 80% - 90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efektif.
4. Jika hasil pencapaian antara 60% - 80%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efektif.
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efektif. Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja langsung dengan total realisasi anggaran belanja.

A.3 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari 3 (tiga) sasaran yang harus dicapai pada tahun 2018 dapat diwujudkan dengan baik, sebagai berikut :

1. Mewujudkan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang efektif
2. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan
3. Meningkatkan kualitas sumber daya dan pelayanan umum bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan

Selanjutnya capaian untuk masing-masing Program dapat dijelaskan pada bagian berikut:

1) Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 13 (tiga belas) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda)
2. Penyusunan KUA,PPAS-Perubahan dan KUA,PPAS
3. Rapat Kordinasi Bappeda dan Litbang Se-Provinsi Kaltara
4. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
5. Koordinasi Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
6. Penyusunan, Evaluasi dan Pengendalian Dokumen Perencanaan Tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)
7. Pengadaan Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
8. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan
9. Kajian Optimalisasi Dana Transfer Daerah Dalam Percepatan Pembangunan Kab. Perbatasan dan Konservasi
10. Kajian Kebutuhan Buku Wajib Belajar Jenjang PAUD, SD, SMP di Kab. Malinau
11. Pembentukan Lembaga dan Forum CSR Kab. Malinau

2) Program Pengembangan Data / Informasi

Program Pengembangan Data / Informasi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

1. Penyusunan LKPJ Bupati Malinau Tahun 2017
2. Penyusunan Profile Daerah Kab. Malinau
3. Dokumentasi Penginderaan Jauh Ibu Kota Kecamatan

3) Program Perencanaan Sosial dan Budaya

Program Pembangunan Sosial dan Budaya terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

1. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan Daerah
2. Pemutahiran Data dan Informasi Rumah Tangga Miskin
3. Pengendalian Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan korupsi Pemerintah Daerah (RAD-PPK Tahun 2018)

4) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam terdiri dari 1 (satu) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

7) Program Administrasi Perkantoran

Program Administrasi Perkantoran terdiri dari 5 (lima) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

1. Penyediaan Alat Tulis Kantor
2. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
3. Penyediaan Makanan dan Minuman
4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
5. Rapat Koordinasi, Konsultasi Dalam dan Luar Daerah
6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8) Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur

Program Peningkatan sarana dan Prasarana aparatur terdiri dari 1 (satu) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas dan Operasional



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

9) Program Perencanaan Pembangunan ekonomi

Program Perencanaan Pembangunan ekonomi terdiri dari 3 (tiga) kegiatan dimana target yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik, atau dengan realisasi masing masing kegiatan sebesar 100%. Dengan rincian kegiatan :

1. Pendampingan kemakmuran hijau
2. Pendampingan kegiatan HOB (Heart Of Borneo)
3. Penunjang kegiatan DP3K TNKM

A. 4 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

Tabel III.3

Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2017 dan Tahun 2018

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	CARA PENGHITUNGAN INDIKATOR SASARAN	SATUAN	REALISASI TAHUN 2017	REALISASI TAHUN 2018	
1	2	3	4	5	6	
1	Terwujudnya konsistensi antara dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan	1 Tersusunnya dokumen untuk penyusunan RKPD kab. Malinau TA 2019	Jumlah dokumen Musrenbang yang tersusun	Dokumen	1	1
		2 Tersusunnya dokumen sebagai dasar penyusunan RAPBD-P 2018 dan RAPBD kab. Malinau TA 2019	Jumlah dokumen Dokumen KUA, PPAS 2019 dan KUPA, PPAS Perubahan 2018 yang tersusun	Dokumen	4	4
		3 Terlaksananya Kegiatan Pembangunan RKPD Perubahan TA. 2018 dan RKPD 2019	Jumlah Dokumen Perencanaan RKPD	Dokumen	2	2



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018

	4	Tersedianya dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA)	Jumlah dokumen hasil evaluasi dan pengendalian dokumen perencanaan tahunan (RPJMD, RKPD, RENSTRA, RENJA) yang tersusun	Dokumen	0	1
	5	Tersedianya sistem informasi perencanaan pembangunan daerah	Jumlah Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersedia	Aplikasi	0	2
	6	Tersedianya dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021	Jumlah dokumen RPJMD perubahan tahun 2016-2021 yang tersusun	Dokumen	0	1
2		Tersedianya data dan informasi pembangunan yang akurat				
	1	Tersedianya Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPRAS	Jumlah Buku Koordinasi dan Monitoring Kegiatan DAK, Bantuan Keuangan Provinsi dan TEPRAS	Buku	0	5
	2	Tersedianya buku profile daerah	Jumlah buku profile daerah yang tersusun	Buku	1	1
	3	Tersedianya buku LKPJ Bupati Malinau TA 2017	Jumlah buku LKPJ Bupati Malinau TA 2017	Jenis Buku	2	2
	4	Tersusunnya laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Jumlah laporan penanggulangan kemiskinan daerah	Dokumen	1	1
3		Meningkatnya kualitas dan profesionalisme SDM perencanaan				
	1	Terkoordinirnya perencanaan pembangunan di Kalimantan utara	Jumlah pelaksanaan rapat koordinasi pembangunan Bappeda & Litbang se-Kalimantan utara	Kali/Tahun	1	1
	2	Tersedianya laporan rekomendasi hasil koordinasi dan konsultasi	Persentase pelaksanaan koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	%	100	100

Indikator sasaran Bappeda dan Litbang tahun 2017 berbeda dengan indikator sasaran tahun 2018 menyesuaikan dengan Renstra Perubahan tahun 2016-2021.



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*

BAB IV PENUTUP

Dalam rangka penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2018, Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2018 sebagai cerminan dari hasil kinerja Bappeda dan Litbang selama satu tahun, yang diukur melalui pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja.

Dari hasil analisis dan penilaian kinerja Bappeda dan Litbang tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa capaian target kinerja tahun 2018 serta capaian target kinerja yang tertuang didalam Renstra 2016-2021 Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau telah terealisasi dan tercapai dengan sangat baik. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerjasama, dan komitmen seluruh personil Bappeda dan Litbang Kabupaten Malinau.

Namun demikian dalam pencapaian indikator kinerja tersebut tidak lepas dari adanya kendala-kendala teknis. Adapun kendala-kendala yang dihadapi diantaranya yakni belum optimalnya validitas sebagian hasil riset sebagai dasar pengambilan kebijakan pembangunan.

Malinau,
Kepala Bappeda dan Litbang

Drs. Kristian, M.Si
NIP. 19661123 199503 1 001



*LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)
BAPPEDA DAN LITBANG TAHUN ANGGARAN 2018*